

**KOORDINASI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KOTA PEKANBARU
DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI PEKANBARU**

Oleh : Andreas Maruli Tua Tambunan

andreastambunan1995@gmail.com

Pembimbing : Dr. Harapan Tua RFS, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The cases of HIV and AIDS increase every year. These cause the importance of the role of KPA and LSM in HIV / AIDS prevention efforts. One of the efforts is the good coordination between KPA and LSM. The purpose of the coordination is to reduce the rate of cases of HIV and AIDS.

The purpose of this research is to analyze the act of the coordination between KPA Pekanbaru with LSM, and also the facts that influence coordination in HIV / AIDS prevention efforts in Pekanbaru. This research uses the concept of coordination theory by Henry Fayol and Cyrill O'Donnell. The research is qualitative with data collection using interview method, observation and documentation.

Based on the result of this research by interviewing and observation, it can be seen that the coordination between KPA Pekanbaru and LSM has been good. This is seen from the good communication and cooperation, regular meetings which are held to give reports and informations and to evaluate the performance of both. There are some facts that influence this coordination. They are facilities and infrastructures, human resources and funds.

Keywords : Koordination, Prevention, HIV and AIDS

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

*Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan masalah kesehatan yang menjadi masalah global. HIV merupakan virus yang dapat menyebabkan hilangnya sistem kekebalan tubuh pada manusia, sedangkan AIDS merupakan kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus yang disebut HIV. HIV dan AIDS telah menjadi pandemik yang sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut dikarenakan belum ditemukannya obat dan vaksin untuk pencegahan. Para penderita atau ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) hanya diberikan obat *Antiretroviral (ARV)* untuk memperlambat penyebaran virus dalam tubuh.*

Penularan infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi tanpa menggunakan alat kontrasepsi, penggunaan alat suntik secara bersama oleh pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) suntikan, ditularkan dari ibu yang mengidap HIV kepada anaknya baik secara kehamilan, persalinan dan selama masa menyusui. Cara penularan lain adalah melalui tranfusi darah yang tercemar, alat suntik dan peralatan lain (tato, dan lain-lain) dan adanya infeksi menular seksual seperti sifilis.

Jumlah kasus HIV/AIDS sangat cepat tersebar bahkan sampai ke pelosok Indonesia termasuk Provinsi Riau. Perkembangan jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Riau terdapat 3.838 kasus HIV dan 1.729 kasus AIDS yang dikumulatikan sampai dengan Juni 2018.

Penyebaran jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Riau tersebar di 12 kabupaten dan kota. Kota Pekanbaru menjadi distribusi terbanyak jumlahnya dalam penyebaran kasus HIV/AIDS. Perkembangan jumlah kasus HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut diakibatkan karena jumlah kasus HIV/AIDS yang meningkat tajam dan cukup signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah kasus HIV/AIDS dari Tahun 2000 s/d Juni Tahun 2018 di Kota Pekanbaru.

No	Tahun	Jumlah Kasus HIV	Jumlah kasus AIDS
1	2000	0	1
2	2002	0	5
3	2004	3	10
4	2005	4	42
5	2006	7	49
6	2007	14	71
7	2008	16	61
8	2009	79	54
9	2010	76	64
10	2011	124	63
11	2012	77	48
12	2013	121	71
13	2014	136	111
14	2015	241	168
15	2016	261	188
16	2017	247	201
17	Juni 2018	56	67
Jumlah		1462	1274

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melalui Komisi Penanggulangan Aids Kota Pekanbaru, 2018

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya dan mulai menjadi ancaman epidemik. Jika dilihat dari tingkatan usia, data kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru yang dikumulatikan sampai dengan juni tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus HIV/AIDS Kumulatif Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkatan Usia s.d Juni Tahun 2018

No	Tingkat Usia	Jumlah Kasus HIV	Jumlah Kasus AIDS
1	< 4 Tahun	36	21
2	5 – 14 Tahun	15	14
3	15 – 19 Tahun	39	16
4	20 – 24 Tahun	263	142
5	25 – 49 Tahun	1041	987
6	> 50 Tahun	68	94
Jumlah		1462	1274

Sumber :Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melalui Komisi Penanggulangan Aids Kota Pekanbaru, 2018

Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru menyerang semua tingkatan umur. Tingkat tertinggi kasus HIV/AIDS ditemukan pada rentang usia 25 – 49 Tahun yang merupakan tingkat usia produktif, dimana pada tahap usia tersebut masih besar melakukan aktifitas sehari-hari seperti bekerja.

Masalah penyebaran HIV/AIDS dan keberadaan pengidap HIV/AIDS atau ODHA bukan semata-mata masalah kesehatan, tetapi mempunyai implikasi sosial, politik, ekonomi dan etis bahkan nampak secara nyata yang dapat menyentuh semua aspek kehidupan secara cepat atau lambat. Hingga sampai saat ini masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh bahkan stigma mereka semakin negatif terhadap ODHA, sehingga para ODHA seringkali mendapat perlakuan yang kurang baik serta diskriminatif dari keluarga maupun masyarakat disekitarnya.

Untuk mencegah dan menanggulangi semakin parahnya penyebaran HIV/AIDS di Kota Pekanbaru sebenarnya bukan hanya tanggungjawab dari pemerintah daerah saja akan tetapi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Dalam mengantisipasi hal-hat terkait masalah HIV/AIDS tersebut maka pemerintah daerah Kota Pekanbaru telah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2009 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk pencapaian upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan berada dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota. Adapun tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2009 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan rumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).
2. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS.
3. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan anggota KPA Kota Pekanbaru.
5. Mengadakan kerjasama regional dalam penanggulangan HIV dan AIDS
6. Menyebarluaskan informasi HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat.
7. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
8. Mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan

HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA Nasional.

10. Mengadakan pertemuan pengurus secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun.
11. Melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Pekanbaru secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan HIV/AIDS tersebut, KPA Kota Pekanbaru dibantu oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terkait dengan HIV/AIDS dan Komunitas Peduli AIDS. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Hubungan KPA dengan LSM merupakan hubungan koordinasi, bukan hubungan intruksi. Koordinasi yang dilakukan KPA Kota Pekanbaru dengan LSM dalam penanggulangan berarti terdapat kesesuaian atau sinkronisasi kerjasama sebagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS baik yang dilaksanakan pemerintah maupun lembaga dan organisasi kemasyarakatan sehingga kegiatan serta kebijakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan dan memiliki berbagai program untuk menekan pertumbuhan/penyebaran virus HIV tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang terdiri dari fenomena dan realita yang ada, maka dapat dibuat suatu perumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana bentuk koordinasi KPA Kota Pekanbaru dengan LSM dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi koordinasi antara KPA Kota Pekanbaru dengan LSM dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk koordinasi antara KPA Kota Pekanbaru dengan LSM dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yang dilakukan KPA Kota Pekanbaru dengan LSM dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
Sebagai sumbangan pemikiran pengetahuan bagi penulis dalam ilmu administrasi public mengenai koordinasi antara Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kota Pekanbaru dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru. Informasi dan referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru dan pihak-pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah menjalin kerjasama.
 - 2) Bagi peneliti selanjutnya pada bidang Ilmu Administrasi Publik.

2. KONSEP TEORI

2.1 Manajemen

Manajemen menurut **Hasibuan (2001:2)** adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.2 Koordinasi

Menurut **Henry Fayol** dan **Cyrill O'Donnell** dalam **Sutarto (2006:143)** mengatakan bahwa koordinasi yang baik hendaklah memuat hal-hal yang sebagai berikut:

1. Komunikasi
Komunikasi merupakan suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.
2. Kerjasama
Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama dibutuhkan adanya saling pengertian dari personil yang bertugas maupun instansi yang terkait.
3. Pembagian Tugas
Pembagian tugas merupakan pembagian yang disebabkan oleh kemampuan yang terbatas dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, pembagian tugas berarti bahwa kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan tugas harus ditentukan dan dikelompokkan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan.
4. Pertemuan dan Rapat
Rapat adalah suatu pertemuan organisasi yang resmi dengan tata tertib yang agak mengikat. Sehingga keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat tersebut bersifat mengikat. Pertemuan melalui rapat antar instansi terkait berfungsi sebagai sarana membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi dan usulan-usulan dari tim dapat disampaikan sebagai bahan untuk mempertimbangkan bagi tim dalam menjalankan tugas.

2.3 Peranan LSM

Menurut **Ahmadi (2004)** lembaga sosial (*institution*) bukanlah sebuah bangunan, bukan pula kumpulan dari sekelompok orang dan bukan sebuah organisasi, tetapi sebuah sistem

norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.

2.4 HIV dan AIDS

Menurut **Green. CW (2007)** HIV merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*. Disebut *Human* (manusia) karena virus ini hanya dapat menginfeksi manusia. *Immuno - deficiency* karena efek virus ini adalah melemahkan kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan segala penyakit yang menyerang tubuh, termasuk golongan virus karena salah satu karakteristiknya adalah tidak mampu memproduksi diri sendiri, melainkan memanfaatkan sel – sel tubuh. Sel darah putih manusia sebagai sel yang berfungsi untuk mengendalikan atau mencegah infeksi oleh virus, bakteri, jamur, parasite dan beberapa jenis kanker diserang oleh HIV yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit.

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yang tertuju pada teori yang bersangkutan dengan permasalahan.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru dan beberapa LSM yang menangani HIV/AIDS di Pekanbaru.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami dan berpengalaman lebih mengenai objek penelitian pelaksanaan pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Informan penelitian dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dengan metode pengambilan

sampel menggunakan metode sampling dan metode snowball sampling pada informan masyarakat.

Adapun key informan pada penelitian ini adalah :

1. Sekretaris KPA Kota Pekanbaru
2. Ketua Yayasan Utama Riau
3. Ketua Yayasan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
4. Ketua Yayasan Sebaya Lancang Kuning Support Group

3.3 Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data primer adalah data pokok dalam penelitian yang diperoleh dari sumber informasi atau informan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kota Pekanbaru dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer melalui sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Sumber data ini dapat diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi (Pengamatan)

Merupakan suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dan menggunakan pedoman observasi. Tujuan observasi adalah untuk memastikan sendiri sampai dimana kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti dimana penelitian mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan, dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah-masalah

koordinasi KPA Kota Pekanbaru dengan LSM dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab langsung untuk memperoleh data dan keterangan seperlunya yang dipandang penting terhadap Responden untuk memperoleh data informasi. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan penelitian, mengenai koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kota Pekanbaru dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas sumber-sumber jenis apapun, baik yang bersifat tulisan, gambar, file, catatan, arsip yang ada pada Kantor KPA Kota Pekanbaru, Kantor Yayasan Utama Riau, Kantor Yayasan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Kantor Yayasan Sebaya Lancang Kuning Support Group.

3.5 Analisa Data

Analisis data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dari instansi terkait dan sumber-sumber lain, kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif melalui hubungan antara fenomena-fenomena yang ada berdasarkan data informasi yang diperlukan yang selanjutnya dijabarkan secara deskriptif atau dijabarkan sesuai dengan kenyataan koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kota Pekanbaru dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru

4.1.1 Komunikasi

Dalam pelaksanaan koordinasi, sangat diperlukan suatu komunikasi yang baik antara KPA Kota Pekanbaru dengan LSM. Komunikasi yang dilakukan KPA Kota Pekanbaru dengan LSM berupa pemberian informasi-informasi terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Komunikasi yang dijalin juga tidak hanya dalam bentuk formal terkadang juga tidak formal.

Pada dasarnya komunikasi merupakan pilar yang paling penting dalam suatu koordinasi. Komunikasi sangat diharapkan cepat sampai kepada setiap anggota agar pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS dapat terlaksana dengan cepat dan efisien. Jika setiap saat komunikasi yang dilakukan secara tatap muka, maka hal tersebut akan memperlambat pemberitahuan dan penyebaran informasi sehingga pelaksanaan penanggulangannya akan menjadi terhambat juga.

4.1.2 Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Kerjasama juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama dibutuhkan adanya saling pengertian, dimana setiap personil atau suatu lembaga untuk saling membantu satu sama lain dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pun dalam pencapaian tujuan bersama. Kegiatan dengan melakukan kerjasama dapat merangkul untuk setiap anggota untuk bisa saling peduli, mengerti, berbagi bahkan saling melengkapi satu sama lain.

KPA Kota Pekanbaru selaku koordinator dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Pekanbaru harus menjalin kerjasama dengan LSM. Adapun bentuk kerjasama yang dijalin KPA Kota Pekanbaru dengan LSM dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS seperti mengadakan pelatihan, kegiatan hari AIDS

sedunia, sosialisasi seperti mengadakan *workshop*, serta sosialisasi ke sekolah ataupun universitas dan ada juga bentuk kerjasama seperti kegiatan penjangkauan langsung ke lapangan dimana terdapat kelompok populasi kunci atau tempat dimana titik resiko tinggi.

4.1.3 Pembagian Tugas

Pembagian tugas merupakan suatu aktivitas dalam menentukan apa tugas yang dilakukan dan siapa yang harus melakukan tugas tersebut. Aktivitas ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan kualitas dalam melaksanakan tugas masing-masing dengan jelas, spesifik serta tidak memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan.

Untuk mencapai suatu bentuk koordinasi yang baik, diperlukan pembagian tugas yang jelas terhadap setiap anggotanya. Akan tetapi dalam pembagian tugas, diketahui bahwa memang tidak ada pembagian tugas yang terstruktur yang diberikan oleh KPA. Dalam upaya penanggulangan, LSM sudah memiliki tugas dan fungsi mereka masing-masing.

Tidak ada pembagian tugas yang terstruktur dari KPA Kota Pekanbaru, bukan berarti tidak adanya pembagian tugas sebagai bentuk koordinasi yang dilakukan KPA terhadap LSM. Pemberian target-target tertentu dalam pencapaian yang dilakukan LSM juga merupakan pembagian tugas sebagai bentuk koordinasi dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru. Dengan adanya target yang diberikan, hal tersebut diharapkan mampu mendorong kinerja dari LSM itu sendiri.

Dalam hal ini, KPA sebagai pusat koordinasi sudah jelas dan tahu akan tugas-tugas serta tanggungjawabnya terhadap penanggulangan HIV dan AIDS dengan memberikan target-target tertentu. Begitu juga dengan LSM, mereka melakukan tugas dan fungsi mereka masing-masing.

4.1.4 Pertemuan Rapat

Pertemuan Rapat merupakan merupakan alat/media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting antara anggota kelompok yang bertujuan untuk memecahkan

atau mencari jalan keluar suatu masalah, penyampaian informasi, sebagai bentuk koordinasi antara intern atau ekstern, agar peserta rapat dapat berpartisipasi terhadap masalah-masalah yang terjadi, mempersiapkan suatu acara atau kegiatan, serta menampung semua permasalahan dari peserta rapat.

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa KPA Kota Pekanbaru rutin mengadakan pertemuan dan rapat, baik pertemuan resmi maupun pertemuan tidak resmi yang waktunya tidak menentu. Pertemuan resmi yang dilaksanakan oleh sekretariat KPA dihadiri oleh Bapak Wakil Walikota selaku Ketua Pelaksana KPA Kota Pekanbaru, LSM-LSM Peduli AIDS berserta anggota terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan lain-lain. Dalam pertemuan-pertemuan resmi seperti itu biasanya LSM melaporkan bagaimana situasi terkini terkait penyebaran HIV/AIDS, kendala-kendala yang dihadapi dilapangan dan pembahasan mengenai pencapaian dalam menekan tingkat penyebaran HIV/AIDS untuk kedepannya.

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi Dalam Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru

4.2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik maka diharapkan koordinasi dapat berjalan dengan maksimal agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai.

KPA Kota Pekanbaru telah memiliki sarana yang cukup baik dan terpelihara juga didukung dengan kebersihan yang terjaga di ruangan Sekretariat KPA itu sendiri. Namun dalam hal prasarana penunjang, KPA Kota Pekanbaru masih minim. Hal tersebut terbukti dari prasarana perkantoran yang dimiliki terdiri dari 2 bagian ruangan yang meliputi 1 ruangan Kepala Sekretariat dan 1 bagian ruang tata usaha (Kepegawaian, program dan umum).

Sarana dan prasarana KPA Kota Pekanbaru masih belum maksimal. Hal tersebut terbukti dari tidak adanya ruang pertemuan atau rapat. Dalam setiap mengadakan pertemuan atau rapat pimpinan KPA Kota Pekanbaru harus meminjam gedung walikota yang tidak selalu bisa digunakan secara terus menerus atau digunakan secara mendadak jika dibutuhkan. Hal tersebut menjadi faktor penghambat koordinasi itu sendiri dimana dalam pelaksanaan koordinasi sangat dibutuhkan suatu ruangan yang menjadi tempat pertemuan atau rapat koordinasi sehingga kinerja dari KPA dan juga LSM dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien.

4.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik dari institusi maupun perusahaan. Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Pada hakekatnya sumber daya manusia sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan bersama dan juga fasilitas fisik yang dapat menunjang pekerjaan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, pentingnya peran manusia dalam pencapaian tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan berjalan dengan baik apabila sumber daya manusia yang mencukupi, begitu juga dengan koordinasi yang dilakukan KPA dengan LSM dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru.

Sumber daya manusia yang terdapat di Sekretaria KPA Kota Pekanbaru sudah baik jika dilihat dari tingkat pendidikannya mengingat terdapat 2 SDM yang tingkat pendidikannya strata 1 dan 1 SDM yang tingkat pendidikannya strata 2. Hal tersebut menjadi faktor pendukung dalam dalam pemikiran dan perencanaan suatu koordinasi dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Meskipun staff pegawai telah memiliki kualitas yang baik, namun tidak dengan jumlah staff pegawainya. Terdapat 3 staff pegawai yang dimiliki oleh sekretariat KPA Kota Pekanbaru yang terdiri dari Kepala

Sekretariat, Pengelolah Program dan Pengelolah Administrasi dan Keuangan. Minimnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki KPA Kota Pekanbaru menyebabkan kinerja yang dilakukan kurang berjalan dengan baik dan menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS itu sendiri.

Pelaksanaan koordinasi yang baik, sangat diharapkan memiliki sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas dalam artian memenuhi kualifikasi dan juga mendukung pelaksanaan kinerja dalam mencapai suatu tujuan. KPA Kota Pekanbaru telah memiliki SDM yang berkualitas tetapi tidak dengan jumlah yang cukup.

4.2.3 Sumber Dana

Sumber dana merupakan faktor pendukung dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, sumber dana digunakan sebagai alat finansial untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana digunakan. Sumber dana juga merupakan suatu rencana keuangan politik yang disusun berdasarkan program yang disahkan. Sumber dana tentu sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi atau lembaga dikarenakan sumber dana dapat mempengaruhi terhadap hasil yang didapatkan.

Sumber dana yang diterima KPA Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diperoleh dari pemerintah dan juga swasta. Dana yang diterima dari pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga bantuan utama lain dari swasta berupa dana dari luar negeri yaitu *Global Fund* melalui Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Akan tetapi sumber dana yang di terima dari lembaga donor yaitu *Global Fund* ini sudah dihentikan dan hanya mendapat bantuan dana dari APBD. Pemutusan dukungan dana *Global Fund* mengakibatkan pelaksanaan koordinasi dan penanggulangan HIV/AIDS menjadi terhambat. Hal tersebut terlihat jelas bahwa jumlah dukungan dana yang diberikan cukup besar. Apabila dipersentasikan perbandingan dana yang diterima dari *Global Fund* cukup besar sekitar 66.6% sedangkan dari pemerintah sekitar 33,3%. Akibatnya KPA Kota

Pekanbaru mendapat suatu hambatan dalam pendanaan kegiatan.

Minimnya sumber dana yang diterima KPA Kota Pekanbaru telah menjadi faktor utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi seperti mengadakan pertemuan atau rapat dan kegiatan penanggulangan seperti *roadshow* juga telah diminimalisir akibat minimnya sumber dana yang diterima KPA.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dari uraian bab sebelumnya mengenai koordinasi KPA Kota Pekanbaru dan LSM dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, maka diperoleh kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa koordinasi KPA Kota Pekanbaru dan LSM peduli Aids dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik. Fenomena yang penulis dapatkan bahwa adanya komunikasi yang terjalin dengan baik, adanya kerjasama yang jelas, pertemuan dan rapat yang rutin diadakan guna memberikan laporan, informasi dan mengevaluasi kinerja masing-masing organisasi. Walaupun dalam hal pembagian tugas masih belum terstruktur namun baik KPA Kota Pekanbaru maupun LSM terkait sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik.
2. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti dari koordinasi KPA Kota Pekanbaru dengan LSM dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru dapat ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut, diantaranya adalah :
 - a. Sarana dan prasarana yang ada di KPA Kota Pekanbaru masih terdapat kekurangan. Dimana tidak adanya ruang pertemuan dan rapat menjadi salah satu kendala yang mengakibatkan terhambatnya

koordinasi itu sendiri. Untuk mengadakan rapat dan pertemuan KPA harus meminjam gedung walikota yang tidak selalu bisa digunakan secara terus menerus atau digunakan secara mendadak jika dibutuhkan.

- b. Sumber daya Manusia (Staff pegawai) yang dimiliki oleh KPA Kota Pekanbaru sangat minim jumlahnya yang menjadi kendala dalam mekukan koordinasi dan juga menyebabkan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru kurang berjalan dengan baik terbukti dengan semakin meningkatnya angka penderita setiap tahunnya. Akan tetapi KPA Kota Pekanbaru tetap mengupayakan penanggulangan HIV dan AIDS dengan sekeras mungkin dalam penurunan angka ODHA tersebut.
- c. Sumber Dana yang diterima untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang berasal dari APBD dan lembaga donor yaitu *Global Fund*. Namun dana yang diterima dari *Global Fund* ini sudah dihentikan yang mengakibatkan KPA hanya mendapat bantuan dana dari APBD. Akan tetapi, KPA Kota Pekanbaru tetap bekerja sesuai dengan tugasnya walaupun memang kurang maksimal karena kurangnya anggaran dana.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memberi perhatian kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru, khususnya dalam hal penambahan sarana dan prasarana serta bantuan dana untuk realisasi penanggulangan HIV/AIDS secara maksimal.
2. Dengan kurangnya SDM yang dimiliki oleh KPA Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa perlu diadakan penambahan staff

pegawai untuk menciptakan kinerja yang lebih baik sehingga kasus penderita HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru bisa berkurang setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi dan Supriyono Widodo. 2004. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Afatin, Nur dan Ahmad Fuad. 2004. *Perkembangan peran LSM dalam Pengembangan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Jurusan PLS UPI.
- Bartlet JG, Gallant JT. 2006. *Medical Management of HIV Infections*. Australia: Jhon Hopskin University School of Medicine
- Djorban, Zubakri. 1999. *Membidik AIDS Iktiar Memahami HIV dan ODHA*. Yogyakarta: Galang Press.
- Green, C. W. 2007. *HIV & TB*. Yogyakarta: Yayasan Spiritia.
- Handyaningrat, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen. Cetakan Kedelapanbelas*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manila, I GK. 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasim, I. 2005. *Manajemen Perubahan*. Bandung: CV Bandung Alfabeta
- KPA. 2007. *Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS*.
- Manullang. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Mas'ud, Fuad. 2004. *Survei Diagnosis Organisasi, Konsep dan Aplikasi*. Semarang: BP Undip
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Setiyono, Budi. 2003. *Pengawasan Pemilu Oleh LSM*. Suara Merdeka
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis. Edisi 1*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Solohin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Sutarto. 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Westa, Pariata. 2005. *Pokok-pokok Pengertian Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Widoyono. 2011. *Penyakit Tropis: Epidemiologi, Penularan, Pencegahan dan Pemberantasannya*. Jakarta: Erlangga.
- Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta: Mitra Cendikia.
- Wiludjeng, Sri SP. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wursanto. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Yahya, yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yohanes, Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graham Ilmu.

Skripsi

Feranika. 2015. *Implementasi Program Penanggulangan HIV dan AIDS di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Tanjung Pinang*. Strata 1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Haji.

Irwanto, Joko. 2010. *Manajemen Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS pada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Surakarta*. Strata 1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret.

Triyaningsih. 2015. *Peran Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang dalam Mengurangi Stigma dan Diskriminasi Masyarakat Terhadap ODHA*. Strata 1 Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.

Winda. 2012. *Kolaborasi antara Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta (KPA DIY) dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Yogyakarta*. Strata 1 Ilmu Administrasi, Universitas Sebelas Maret

Jurnal

Andriyus, 2011. "Peranan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru dalam Mencegah dan Menanggulangi HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru". Pekanbaru: Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Riau.

Internet

Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru
(kpapekanbaru.blogspot.co.id).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2009 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 776 Tahun 2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Periode 2017 - 2022